

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WONODADI
TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WONODADI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	42
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	53
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja PD dan Pencapaian Renstra PD	17
Tabel	2.2	E 81 Tahun 2024	29
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel	2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	48
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	57
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasran Kecamatan Wonodadi	58
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	59
Tabel	3.4	Rumusan Rencana Program Kegiatan Kecamatan Wonodadi Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Blitar (SIPD RI)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Wonodadi	1
------------	---------------------------------	---

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Tahun 2026. Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan capaian tahun berjalan 2026 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029.

Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2026. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Wonodadi, 25 Agustus 2025

CAMAT WONODADI

IMAM SAFIL. SH. MH
Pembina Tk. I
NIP. 197004041997031008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan Wonodadi merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar yang terletak paling barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Wonodadi seluas 111,24 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Udanawu dan Kediri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Srengat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Gambar 1.1 PETA WILAYAH KECAMATAN WONODADI



Kecamatan Wonodadi terdiri dari 11 desa antara lain :

- Desa Kolomayan,
- Desa pikatan,
- Desa Wonodadi,
- Desa Kaliboto,
- Desa Kunir,
- Desa Gandekan,
- Desa Rejosari,
- Desa Salam,
- Desa Jatèn,
- Desa Tawangrejo
- Desa Kebonagung

Dari 11 desa tersebut memiliki 30 dusun, 61 RT dan 249 RW

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Wonodadi secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:

- (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
- (b) Orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah
- (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
- (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah

tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2026 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Wonodadi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan, Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/ kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sasaran untuk program ini adalah nilai score SAKIP yang telah diperoleh, yaitu untuk Kecamatan Wonodadi adalah 62,8 dengan predikat score adalah “ B ‘, sedangkan untuk indikator programnya adalah rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100 %.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikatornya Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan

Pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 70,12 % atau sebesar Rp. 780.000,- dari pagu anggaran Rp 1.112.442,- target 100 %

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikatornya adalah persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel .

Pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 94,32 % atau sebesar Rp. 1.422.775.603,- sebesar dari pagu anggaran Rp. 1.508.511.109,- target 100 %.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikatornya adalah persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 98,53 % atau sebesar 88.838.500,- dari pagu anggaran Rp. 90.160.00,- target 100 %.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel .

Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 96,74 % atau sebesar Rp. 94.165.400,- dari pagu anggaran Rp. 97.328.662,- target 100 %.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikatornya persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran

Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 96,64 % atau sebesar Rp. 87.407.000,- dari pagu anggaran Rp. 90.441.912,- target 100 %

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikatornya adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu.

Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 100% atau sebesar Rp. 87.230.352,- dari pagu anggaran Rp. 87.230.352,- target 100 %.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik.

Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 84,30 % atau sebesar Rp.133.067.376,- dari pagu anggaran Rp. 157.807.500,-target 100 %.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikatornya program ini adalah persentase desa /kelurahan dengan predikat IKM baik dengan target 100 %

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 2.298.040,- dengan capaian realisasi 97,69 % atau sebesar Rp. 2.245.000,-.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 2.783.040,- dengan capaian realisasi 98,09% atau sebesar Rp. 2.730.000,-.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 5.293.040,- dengan capaian realisasi 99 % atau sebesar Rp. 5.240.000,-.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan..

Kegiatan Program ini adalah :

 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 5 kegiatan dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 10.105.000,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 95,69 % atau sebesar Rp. 10.559.944,-.
 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 5 kegiatan dan tercapai dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 135.905.120,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 98,99 % atau sebesar Rp. 134.537.500,-.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator program ini adalah jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan.

Kegiatan program ini adalah :

 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran Rp 6.294.376,- dengan capaian realisasi 83,09 % atau sebesar Rp. 5.230.000,-.
 2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2024 dengan pagu 3203.296,- dengan capaian realisasi 83,51 % atau sebesar Rp. 2.675.000,-.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator program ini adalah jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan.

Kegiatannya Program ini adalah :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator program ini adalah jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 10 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100 %. Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 89.837.160,- dengan capaian realisasi sampai triwulan IV adalah 99,73 % atau sebesar Rp. 89.595.000,-

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikatornya adalah jumlah peraturan perundang – undangan yang dibuat.

Kegiatannya : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator program adalah Jumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan capaian kinerja 100 %. Indikator kegiatan adalah jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp. 39.438.936,- dengan capaian realisasi sampai triwulan IV adalah 92,7 % atau sebesar Rp. 36.565.000,-.

Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100 %.

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu Rp 810.500,- terealisasi Rp. 800.000,- atau 98,70 %.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikatornya adalah persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 1.492.470.358,- telah terealisasi sebesar Rp 967.933.278,- atau 64,18%.

Sub kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 18.780.000,- terealisasi sebesar Rp 9.390.000,- atau 50 %.

Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dari pagu anggaran Rp. 524.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 500.000 atau 95,42 %

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikatornya Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi belum terealisasi.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dari pagu anggaran Rp 34.250.450 terealisasi Rp. 31.472.551 atau 91,89 %

Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 14967.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.550.000,- atau 23,72 %.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100%.

Sub kegiatan Pengadaan mebel dari pagu anggaran sebesar Rp 37.811.200,- telah belum terealisasi.

Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu anggaran sebesar Rp 17.986.800 belum terealisasi .

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikatornya adalah persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100%.

Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari pagu Rp 27.168.000,- terealisasi Rp 5.537.012,- atau 20,38 %

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari pagu Rp 87.257.304,- terealisasi Rp 39.780.838,- atau 45,59 %

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan target 80 %.

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dari pagu anggaran sebesar Rp 45.851.000,- telah terealisasi sebesar Rp 13.191.000,- atau 28,77 % .

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indicator persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik.
 - a. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator jumlah koordinasi yang diselenggarakan ditingkat kecamatan
\Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan indikator jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 3.897.000,- belum terealisasi
 - b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan indicator jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target 6 layanan.
Sub kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan dengan pagu Rp 3392.000,- terealisasi Rp. 1.380.000,- atau 40,68 %
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan dengan pagu Rp. 5.392.000,- belum terealisasi
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 Indicator program adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa/kelurahan targetnya 5 kegiatan
 - a. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 Indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 11 Kali
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 4.892.000,- terealisasi sebesar Rp 64.770.000,- atau 97,51 %
Sub kegiatan Sikronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.897.000,- terealisasi Rp 3.335.000,- atau 85,58 %
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
 Indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 11 kali
Sub kegiatan Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya P4 dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan pagu anggaran Rp. 2.892.000,- terealisasi Rp. 1.115.000,- atau 39,94 %.
Sub Kegiatan peningkatan pangan keluarga dengan pagu anggaran Rp. 8.892.000,- terealisasi Rp. 2.500.000,- atau 28,12 %

Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah pagu anggaran Rp. 2.892.000,- belum terealisasi.

Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya pagu anggaran Rp. 2.892.000,- belum terealisasi

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dengan target 5 kegiatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target 6 kali .

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 3.897.000,- telah terealisasi sebesar Rp 43.310.000,- atau 84,94 %.

Sub kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 4.970.400 terealisasi sebesar Rp. 900.000,- atau 18,11 %.
 - b. Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah indikatornya adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan dengan target 5 kali.

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rp. 2.892.000,- belum terealisasi.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan dengan target 10 kegiatan.
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dengan target 6 kali
Sub kegiatan Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dari pagu anggaran sebesar Rp 55.289.000 terealisasi sebesar RP. 11.860.000 atau 21,45 % .
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Peraturan perundang-undangan desa yang dibuat dengan target 20 dokumen
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan dengan target 12 desa.
Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 6.500.000 belum terealisasi atau 0%.

Sub kegiatan fasilitasi Administrasi tata pemerintah desa dengan pagu anggaran Rp. 11.402.000 terealisasi Rp. 5.180.000 atau 45,43 %

Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa dari pagu Rp 4.892.000 terealisasi Rp 1.400.000 atau 28,62 %.

Sub Kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan pagu anggaran Rp. 3.196.000,- belum terealisasi.

Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa dari pagu Rp 10.196.000 terealisasi Rp 3.380.000,- atau 33,15 %

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :
 - a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparaturnya yang ada.
 - b. Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan pada tahun berjalan ada kegiatan insidental yang sebelumnya belum masuk pada perencanaan sehingga perlu adanya penyesuaian pada saat perubahan rencana anggaran.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi tahun 2021 - 2026 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
- c. Perlu adanya pengusulan penambahan personil pegawai di Kecamatan Wonodadi kepada Dinas Pengampu.

Rincian evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Blitar

Kode	Ururan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) (Kegiatan) (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1). 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan admin perkantoran	80%	75%	80%	80%	100%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Formulasi dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	12 dak	9 dak	65%	80%		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		19 dak	19 dak	19 dak	100%	19 dak	57	30%
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Formulasi laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 org/bulan	13 org/bulan	13 org/bulan	100%	16 org/bulan	45 org/bulan	

	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Haril Penyediaan Administrari Pelaksanaan Tugas ASN		36	9 dak	9 dak	100	9 dak	54 dak	
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Kaordinari dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		21 dak					21 dak	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulanan/ semester/ tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kaordinari Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triulana n/ Semesteran SKPD		12	12 lap	12 lap	100	12 lap	36 lap	
x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pejabat ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80%	100	12	3		18		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16	13 org	13 org	100	13 org	42 org	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pejabat administrasi umum yang dilakukannya secara akuntabel	80%	80	100	100	100	100%		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Kampanan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Direalisasi		6 paket	6 paket	6 paket	100	6 paket	18 Paket	

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		8 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	12 paket	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		22 Paket	6 paket	6 paket	100	4 paket	32 paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	6 paket	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	99 lap	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						12 dak	12 dak	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat Saranan	100%	9	8	11		6		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 unit	6 unit	5 unit		6 unit	20 unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan tepat waktu	100%				100	100%		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	36 lap	

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12lap	12lap	12lap	100	12lap	36lap	
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik</i>	80%		12	13		12		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	15 unit	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6	6	6	100	4 unit		
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi		2	2	2	100	1 unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	85%		84	82		100		

7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah kaordinari Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>4 Kali</i>	15	37	37	100	12		
	Koordinasi sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Kaordinari Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12 lap	4 lap	4 lap	100	4 lap		
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Fasilitas dan kaordinari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>4 kali</i>	6	6	4		6		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4 lap	2 lap	2 lap	100	4 lap		

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Fasilitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	4 Kali	16				10		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		16	4lap	4lap	100	4lap		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	perantara fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		5	4		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5 kegiatan	2	12	16		12		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			100	100	100	5 lembaga kemasyarakatan		

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			10 dak	5 dak	25 dak			
.01.03.2.06	<i>Pemberdayaan dan Karakterisasi Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Karakterisasi Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>5 kegiatan</i>				30			
	Pembentukan dan penumbuhan karakter melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya P4 dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.					5			
	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					5 kelq			

	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						5		
	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						5		
	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						5		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pertentangan gangguan transtibum yang terelaborasi	100%		85	85		100		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</i>	5 kegiatan	2	24	24		12		

	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Haril Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		14	3	3		4lap		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		7	11	11		11lap		
7.01.04.2.02	Koordinasi dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Hariliteri dan Koordinasi dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 kegiatan	4	30	30	100	8lap		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Haril Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		11	4	4	100	11lap		

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perrentare fasilitari penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%		10	6		100		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum Survei Penguasaan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum</i>		4				12		
	Pembinaan peraturan dan keraturan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peraturan dan Keraturan		4	200	200	100	1183 org		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perrentare Desa yang menetapkan RKPDor Tepat Waktu	32		20	15				
		Perrentare Desa yang menetapkan APBDor Tepat Waktu	32							
		Perrentare Desa yang menetapkan LPPDor Tepat Waktu	32							
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Keperdinari Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa</i>	11kali		30	30	100	14		

	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10	10	10	100	10	
	Fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10	10	10	100	10	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				10	8	8	100	8	
	fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10	10	100	10	dak
	fasilitasi penerapan peningkatan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan				3	3	100	-	lap
	fasilitasi pelaksanaan tugas kader dan perangkat desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4	4	100		dak
	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan				11	11			dak

	rekamendari peningkatan dan pemberhentian perangkat dera	Jumlah Dokumen Rekamendari Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Dera				1	1	100	3	ak
	fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lombaqa kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lombaqa Kemasyarakatan				1	1	100		dok
	koordinasi pendamping dera di wilayahnya	Jumlah Laporan Haril Koordinasi Pendampingan Dera di Wilayahnya				2	3			lap

No	Arah	Program/Kepentingan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Sub-Target/Output	Target Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan RP.ACH/Revisi		Berkas/Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun Anggaran (2025) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Berkas/Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisi (2025)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Pada Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah di Tahun 2025	Target Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah di Tahun 2025 (%)	Jenis Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025				2025		2025		2025		2025						
1	2	3	4	5		6	7	8				9				10	11	12	13	
				a	bp			c	bp	d	bp	e	bp	f	bp					g
<p>Faktor Penghambat pencapaian Kinerja</p> <p>T.01.004.00.01.000. T.01.01. PROGRAM PEMBERANCIAN DAN PEMERINTAHAN DESA/KAMPUS/PERKOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi sumber pembiayaan tidak optimalnya dalam proses pelaksanaan, menimbulkan keterlambatan yang akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan yang direncanakan <p>T.01.004.00.01.000. T.01.02. PROGRAM PENYULUHANSARANA PEMBERWILAYAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa indikator yang belum mampu menunjukkan kinerja terdapat <p>T.01.004.00.01.000. T.01.03. PROGRAM PEMBERKUALIFIKASIAN MANUSIAKAWASDA DAN KELUARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Dasa terdapat yang belum menunjukkan terdapat menunjukkan pencapaian data - Ada Dasa terdapat yang belum menunjukkan terdapat menunjukkan pencapaian data - Ada Dasa terdapat yang belum menunjukkan terdapat menunjukkan pencapaian data - Ada Dasa terdapat yang belum menunjukkan terdapat menunjukkan pencapaian data <p>T.01.004.00.01.000. T.01.04. PROGRAM OODORAN DAN KEBERSIHAN DAN KEYERIMAN LUMAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya dalam mengelola limbah rumah tangga, akan tetapi belum menunjukkan data dan pengapuran limbah rumah tangga - Rendahnya dalam mengelola limbah rumah tangga, akan tetapi belum menunjukkan data dan pengapuran limbah rumah tangga - Rendahnya dalam mengelola limbah rumah tangga, akan tetapi belum menunjukkan data dan pengapuran limbah rumah tangga - Rendahnya dalam mengelola limbah rumah tangga, akan tetapi belum menunjukkan data dan pengapuran limbah rumah tangga <p>T.01.004.00.01.000. T.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarang dan aplikasi yang digunakan terdapat yang ada 																				
Terdapat lampir yang ditunjukkan dalam bentuk terdapat.																				
Terdapat lampir yang ditunjukkan dalam bentuk terdapat.																				

c. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Wonodadi telah menentukan target atas kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator tujuan dan sasaran yang telah ditentukan targetnya oleh Kecamatan Wonodadi tahun 2024 telah di sesuaikan dengan indikator RKPD Kabupaten Blitar tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, maka di Kecamatan Wonodadi dilaksanakan program penunjang dan program wajib sebaagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator untuk program ini adalah nilai score SAKIP yang telah diperoleh, yaitu untuk Kecamatan Wonodadi adalah 62,8 dengan predikat adalah “ B.”

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikatornya adalah Persentase Desa/Kelurahan dengan predikat IKM baik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 990.000,-

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikatornya adalah jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.915.000

Kegiatan Program ini adalah :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Indikatornya adalah jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 9.497.672,-
- Kegiatan program ini adalah :
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Indikatornya adalah jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umatberagama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan pagu anggran sebesar Rp. 82.837.160,-
- Kegiatannya Program in adalah :
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Indikatornya adalah jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.438.935
1. Kegiatannya : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan progam dan kegiatan pada Kecamatan wonodadi dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian knerja pelayanan perangkat daerah sebagai berikut ::

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Stand art nasion al	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN											
	Indek Kepuasan Masyarakat			80	80 %	85 %	85 %					
	<i>Skor SAKIP Perangkat Daerah</i>			63	63	64	65	69	62,8			
	<i>Persentase desa Mandiri di Kecamatan</i>			90	90	92	94	85	90			
	<i>Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan</i>			75	80	85	90	85	90			
2	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN											
a	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik					85	85					
	<i>"Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan "</i>			4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali			
	<i>"Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan"</i>			4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 kali			
	<i>Jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>			4	4	4	4	4	4			
b	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					100 %	100%					
	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</i>			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa			
	<i>Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa			
C	"- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu					92 %	94 %					

No	Indikator	SPM/ Stand art nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu"					92 % 92 %	94 % 94 %					
	"Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"			11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa			
d	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan				100 %	100%	100%	100	100			
	"Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"			4	4	4	4	4	4			
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			4	4	4	4	4	4			
e	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	100 %					
	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			6	6	6	6	6	6			
f	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan admin perkantoran					80	81					
	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat Sasaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	
	persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Stand art nasion al	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan tepat waktu</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat disimpulkan tugas kecamatan adalah melaksanakan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari uraian di atas tersebut dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Wonodadi. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Wonodadi. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 25 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 11 (sepuluh) orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Beberapa program kegiatan telah disesuaikan sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja maupun output dan output spesifiknya.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Wonodadi yaitu:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggalipotensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Capaian kinerja tugas pokok dan fungsi kecamatan ini telah mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yaitu “ ***Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya*** “ yang dijabarkan dalam misi ke-3 yaitu “ ***Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat*** “.

2.4 Review Terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakaisebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “ Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif “. Tema ini mencerminkan strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan domestik dan menjawab tantangan global melalui dua pilar utama yaitu:

1. Kedaulatan pangan dan energi
Menekankan pentingnya kemandirian dalam sektor pangan dan energi untuk memastikan stabilitas dan berkelanjutan nasional.
2. Ekonomi yang produktif dan Inklusif
Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan

Disamping mengacu pada RPJMN Nasional, Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan 2026 RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : "Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045"

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka Isu-isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- 1) Ketahanan Pangan serta Peningkatan roduktifitas dan Nilai Tambah Komoditas
- 2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan
- 3) Penngkatan Infrastruktur Dasar dan Eknomi .
- 4) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja
- 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
- 7) Optimalsasi Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Wonodadi	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.222.191.558	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Wonodadi	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.960.276.856	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	1.021.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	810.500	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	1.524.658.314	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	1.480.431.858	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98.440.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16.720.000	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	121.699.212	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	54.666.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	102.730.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	55.798.000	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	114.425.304	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	114.425.304	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	239.017.528	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	23.7424.944	
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	12.384.120	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	100 %	12.681.000	
a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	4 kali	3.798.040	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	4 kali	3.897.000	
b	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Juml Fasilitasi dan koordinasi Penyel Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	90%	3.293.040	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Juml Fasilitasi dan koordinasi Penyel Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	90%	3.392.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
c	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	4 kali	5.293.040	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	4 kali	5.392.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		138.589.064	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		26.357.000	
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	11 kali	8.766.904	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	11 kali	8.789.000	
b	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	11 kali	129.822.160	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	11 kali	17.568.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100 %	12.497.672			Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan		11.759.400	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonodadi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 kali	9.294.376	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonodadi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 kali	8.867.400	
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kali	3.203.296	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kali	2.892.000	

5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	74.72.160	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4 kali	55.289.000	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4 kali	74.272.160	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4 kali	74,272,160	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonodadi	- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		43.468.240	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonodadi	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		36.186.000	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		43.468.240	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		36.186.000	

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut adalah usulan Program dan kegiatan yang disetujui pada Musrenbang tahun 2025

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Kecamatan Wonodadi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	KET
1	Program : Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup				
1.1	Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Dsn Setinggil Rt 03/01 Desa Gandekan , Kab. Blitar	Tingkat kerusakan jalan		Masalah : Jalan sudah sangat rusak, dan jalan tersebut sebagai akses masyarakat dan merupakan jalan utama menuju ke sekolah Wahid Hasyim Setinggil. Pada Jalan tersebut sering terjadi kecelakaan ketika hujan, Panjang Jalan 1 KM OPD tujuan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2	Kegiatan : Pembangunan Jalan	Dsn bakalan s/d seduri 750M, Kab. Blitar	Tingkat kerusakan jalan		Masalah : Jalan berlubang OPD tujuan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3	Kegiatan : Pembangunan Jalan	Dsn. Salam RT 01 RW 01 sampai Dsn. Salam RT 01 RW 02, Kab. Blitar	Tingkat Kerusakan Jalan		Masalah : Kurang lebarnya jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung sehingga laju transportasi kurang maksimal. OPD tujuan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Kegiatan : Pembangunan Jamban	Desa Kolomayan Kec Wonodadi Blitar, Kab. Blitar	jamban sehat yang di bangun		Masalah : Masih adanya warga yang belum memiliki jamban yang layak OPD tujuan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Desa Rejosari RT 4 RW 1 sampai RT 4 RW 2, Kab. Blita	Tingkat kerusakan jalan		Masalah : Jalan rusak dan berlubang OPD tujuan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	KET
2	Program : Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian				
2.1	Kegiatan : Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Kebonagung I dan Kebonagung II, Kab. Blitar	pelatihan pengolahan hasil pertanian yang dilaksanakan		Masalah : Penanggulan Hasil Panen yg Kurang Maksimal OPD tujuan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2	Kegiatan : Pelatihan tentang pembuatan pakan ternak	Desa Wonodadi, Kab. Blit	pelatihan tentang pembuatan pakan ternak yang dilaksanakan		Masalah : Banyak peternak belum paham tentang pembuatan pakan ternak OPD tujuan : Dinas Peternakan dan Perikanan
2.3	Kegiatan : Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik)	Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Kunir , Kab. Blit	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) yang disediakan		Masalah : Penggunaan pupuk kimia (urea ,panzka, za, kcl dll) yang terus menerus akan mengurangi tingkat kesuburan tanah, diantara cara yang digunakan adalah dengan memperbaiki tingkat kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk alami atau pupuk organik. OPD tujuan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.4	Kegiatan : Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Handtraktor rotary	Dusun Krajan Rt 03 Rw 05 Desa Kunir, Kab. Blitar	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Handtraktor rotary yang disediakan		Masalah : Tenaga kerja dibidang pertanian semakin berkurang, sedangkan lahan pertanian harus sesegera mungkin untuk diolah agar masa panen berikutnya tidak ketinggalan. Sehingga kebutuhan akan alat dan mesin pertanian sangat diperlukan, terutama handtraktor rotary. OPD tujuan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.5	Kegiatan : Pelatihan Budidaya Ternak	Desa Wonodadi, Kab. Blitar	Pelatihan Budidaya Ternak yang dilaksanakan		Masalah : Belum memahami tentang budidaya ternak dengan baik OPD tujuan : Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	KET
3	Program : Masyarakat penguatan industri dan UMKM, serta pengembangan pariwisata dan ekraf untuk pembangunan ekonomi.				
3.1	Kegiatan : Pelatihan Produksi Olahan Makanan / Minuman berbahan dasar potensi lokal (nanas, pisang, cabai, melon, gula kelapa, telur, ayam pedaging)	Balai Desa Gandekan, Kab. Blitar	Pelatihan Produksi Olahan Makanan / Minuman berbahan dasar potensi lokal (nanas, pisang, cabai, melon, gula kelapa, telur, ayam pedaging) yang dilaksanakan		Masalah : Kurang adanya produk unggulan yang berasal dari desa gandekan dan juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah suatu bahan baku agar bernilai jual yang lebih tinggi OPD tujuan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.2	Kegiatan : Pelatihan Digital Marketing	Dsn. Salam RT 02 RW 01, Kab. Blitar	Pelatihan Digital Marketing yang dilaksanakan		Masalah : Kurang kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemasaran produk UMKM lewat digital marketing. OPD tujuan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.3	Kegiatan : Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha Pemula	Desa Kebonagung, Kab. Blitar	Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha Pemula yang dilaksanakan		Masalah : Penanggulangan Kenakalan Remaja/Pemuda OPD tujuan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.4	Kegiatan : Pelatihan pengembangan usaha Kerajinan/Handmade/Batik.	Dusun Krajan RT 4 RW 4 Desa Kunir , Kab. Blitar	Pelatihan pengembangan usaha Kerajinan/Handmade/Batik yang dilaksanakan		Masalah : Mendukung anak muda untuk mengembangkan keterampilan yang nantinya bisa dijadikan sebagai peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan zaman OPD tujuan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.5	Kegiatan : Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha Pemula	Desa Wonodadi, Kab. Blitar	Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha Pemula yang dilaksanakan		Masalah : Kurang pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan usaha OPD tujuan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Program : Pengembangan SDM yang inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	KET
4.1	Kegiatan : Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan	Desa Rejosari, Kab. Blita	Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan yang dilaksanakan		Masalah : Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan kesehatan yang ada di desa OPD tujuan : Dinas Kesehatan
4.2	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS (Karang Taruna, Karang Werda)	Desa Pikatan, Kab. Blitar	Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS (Karang Taruna, Karang Werda) yang dilaksanakan		Masalah : Perlunya dukungan untuk fasilitas karangtaruna OPD Tujuan : Dinas Sosial
4.3	Kegiatan : Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan	Dusun Krajan RT 04 RW 04 Desa Kunir Kab. Blitar	Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan yang dilaksanakan		Masalah : Untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan Kesehatan, maka Kader Kesehatan yang ada di Desa Kunir sejumlah 50 orang kami usulkan untuk diadakan Pelatihan Kapasitas kader Pemberdayaan Kesehatan OPD tujuan : Dinas Kesehatan
4.4	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS (Karang Taruna, Karang Werda)	Kebonagung I dan Kebonagung II, Kab. Blitar	Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS (Karang Taruna, Karang Werda) yang dilaksanakan		Masalah : Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda OPD tujuan : Dinas Sosial
4.5	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS (Karang Taruna, Karang Werda)	Desa Wonodadi, Kab. Blita	Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS (Karang Taruna, Karang Werda) yang dilaksanakan		Masalah : Meningkatkan SDM Kepemudaan dan pemberdayaan masyarakat OPD tujuan : Dinas Sosial
5	Program : Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik				
5.1	Kegiatan : Peningkatan kapasitas BPD	Dusun Krajan Rt 04 Rw 04 Desa Kunir, Kab. Blitar	Peningkatan kapasitas BPD yang dilaksanakan		Masalah : Untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan BPD masalah Administrasi Pemerintahan Desa OPD tujuan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	KET
5.2	Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa	Kebonagung I, Kab. Blitar	Pelatihan Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa yang dilaksanakan		Masalah : Untuk Mempermudah Input Data Penduduk OPD tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.3	Kegiatan : Peningkatan kapasitas BPD	Desa Pikatan, Kab. Blitar	Peningkatan kapasitas BPD yang dilaksanakan		Masalah : Perlunya peningkatan kapasitas BPD OPD tujuan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan baru dari Kepala Daerah. Oleh karena itu sesuai dengan amanat peraturan perundangan, tujuan sasaran yang ditetapkan dalam rencana kerja (renja) PD tahun 2026 harus selaras dengan kerangka perencanaan jangka menengah sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan awal rencana strategis (renstra) kecamatan wonodadi tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran baru ini tidak meninggalkan hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Sebaliknya, isi – isu strategis dan prioritas tindak lanjut yang telah diidentifikasi dalam bab II terutama target – target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya tetap menjadi fokus utama dan kini ditegrasikan kedalam kerangka sasaran yang baru untuk memastikan adanya kesinambungan dan penyelesaian masalah secara tuntas.

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Rencan Kerja Pembangunan Nasional 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2026 yang meliputi:

- Kedaulatan Pangan dan Energi
 - a. Pangan : Optimalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pelaksanaan Lumbung Pangan
 - b. Energi : Peningkatan Bauran Etanol dan Biodiesel, serta pengembangan energy terbarukan
 - c. Air : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir
 - d. Pengelolaan Sampah : Meningkatkan Pengelolaan Sampah yang efektif
- Ekonomi Produktif dan Inklusif
 - a. Pendidikan : Makan bergizi gratis : Percepatan Renovasi Sekolah; Digitalisasi Pendidikan
 - b. Kesehatan : Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Daerah : Program cek kesehatan gratis.
 - c. Ekonomi : Deregulasi dan Kepastian Hukum ; Percepatan pertumbuhan Ekonomi melalui hilirisasi dan Danantara
 - d. Adopsi Teknologi dan Inovasi
 - e. Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui program 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih
 - f. Fiskal : Fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2026 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan

Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2026 :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Melalui Penguatan system perlindungan social, pemberdayaan ekonomi masyarakt serta perbaikan layanan dasa.

2. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja berkualitas melalui penguatan ekosistem inovasi, pengembangan ketrampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap UMKM dan sector industry.
3. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur untuk pemerataan
4. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan inovatif dan holistic, dengan menekankan akses pendidikan berkualitas, kurikulum berbasis kompetensi serta integrasi STEM dan keterkaitan industry.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas spesialis, teknologi kesehatan, dan system surveilans yang kuat
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi melalui digitalisasi layanan public, peningkatan akuntabilitas keuangan, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah.
7. Transformasi sektor pertanian melalui modernisasi, teknologi, dan penguatan rantai nilai untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
8. Penguatan kohesi social dan pembangunan berbasis budaya melalui pengembangan pusat kreatif, destinasi wisata, serta program inklusif untuk kesetaraan gender, pemuda, dan penyandang disabilitas.
9. Pembangunan berkelanjutan melalui konservasi lingkungan, penerapan ekonomi sirkular, dan penguatan energy terbarukan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2026 “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif.”

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 :

- a. Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian;
- c. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UMKM dan Industri, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pengembangan Ekonomi;
- d. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif; dan
- e. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik.

Mengacu Proritas pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 diatas, point c. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UMKM dan Industri, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pengembangan Ekonomi, point d. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif, point e Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik menjadikan 3 point tersebut menjadi arah maksud dan tujuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran

dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan daerah Kecamatan Kademangan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kademangan Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Kademangan harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2025-2029, sebagai berikut: “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai problem solving permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2025-2029. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani Dan Rohani, Berpendidikan Yang Baik, Berdaya Saing, Melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera Dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda Yang Siap Menyosong Indonesia Emas.

MISI 2 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokas Didukung Infrastruktur Yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak Dan Rensponsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat Maupun Dunia Usaha Serta Tangguh Bencana.

MISI 3 “Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Yang Akuntabel Dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani Serta Peka Terhadap Aspirasi Dan Kebutuhan Masyarakat.

MISI 4 “Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Pelaksanaan Pembangunan.”

Kecamatan Wonodadi sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian *Misi Ke-3 “Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Yang Akuntabel Dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani Serta Peka Terhadap Aspirasi Dan Kebutuhan Masyarakat”*. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Wonodadi pada tahun 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya Integritas Penyelenggara Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2026, ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- b. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan yang ada ;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan public
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- f. Meningkatkan system pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal periode Renstra PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke					Kondisi akhir periode Renstra PD
					Realisasi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	85	85	90	90	95	100
		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri	Persen	90	92	94	96	97	98	100
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	Angka	3	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Skor SAKIP	Skor	62,8	64	65	67	68	70	70

Sumber : data Kecamatan Wonodadi yang diolah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85
		1 Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri	Persen	94
		2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	Angka	3
		3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor SAKIP	Skor	65

Sumber : data Kecamatan Wonodadi yang diolah

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada sub-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah serangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wondadi pada Tahun Anggaran 2026. Sebagai wujud adaptasi terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru dan amanat dari Rancangan Awal Renstra 2025-2029, pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirancang secara spesifik untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran strategis yang baru.

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Perumusan program dan kegiatan ini didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan strategis untuk memastikan relevansi dan dampaknya, antara lain:
 - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Seluruh program dan kegiatan dirancang sebagai penjabaran tahunan dari Draft Rancangan Awal Renstra 2025-2029, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA” dan Misi-Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
 - b. Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Daerah: Program dirancang untuk selaras dengan prioritas nasional dan daerah, seperti:
 - 1) Penanganan Stunting dan Peningkatan Ketahanan Pangan: Diwujudkan melalui sub kegiatan baru yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang menargetkan tiap desa.
 - 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Diakomodasi melalui sub kegiatan baru Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan.
 - 3) Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan: Diterjemahkan dalam sub kegiatan baru Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
 - c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja: Perumusan kegiatan juga merupakan respons langsung terhadap hasil evaluasi kinerja tahun 2024 (sebagaimana dianalisis di Bab II), terutama untuk menindaklanjuti target-target yang belum tercapai seperti peningkatan Skor SAKIP Persentase desa yang memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan dan Jumlah keeksisan Bumdes.
2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Secara keseluruhan, Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi Tahun 2026 terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan.

- a) Sifat Penyebaran Lokasi: Sifat penyebaran lokasi kegiatan bervariasi. Sebagian besar kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, dan pembinaan (seperti fasilitasi penyusunan peraturan desa) tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Wonodadi untuk menjamin pemerataan. Namun, terdapat pula kegiatan yang terfokus pada kelompok sasaran tertentu, seperti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang akan menjangkau 11 desa di lokasi yang telah ditentukan.
 - b) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif: Total kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Wonodadi pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 2.574.909.609.49. Sumber pendanaan untuk seluruh kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Penjelasan Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rumusan 6 program dalam Renja PD ini telah selaras dengan program-program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 (Perbup No. 73 Tahun 2025). Namun, rincian kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat baru seperti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan hasil dari analisis kebutuhan spesifik Kecamatan Wonodadi. Usulan-usulan baru ini tidak dirinci dalam dokumen RKPD yang bersifat makro, namun sangat esensial untuk menerjemahkan arah kebijakan baru dari Renstra 2025-2029 dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.
 4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Rincian lengkap mengenai rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi, Pagu Indikatif, serta Prakiraan Maju untuk tahun 2027 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Berikut adalah tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Wonodadi Tahun 2026

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan Praliraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Kecamatan Wonodadi

Lembar :

Kode	U rusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakaan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Wonodadi								
7	Unsur Kewilayahan								
7 01	Kecamatan								
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan admin perkantoran satuan %	Kecamatan Wonodadi	81%	1.992.457.374	DAU		82%	2.484.958.068
7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Wonodadi		2.598.000	DAU			14.641.000
7 01 01 2 02	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Wonodadi		1.534.277.574	DAU			1.947.172.827
7 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Kecamatan Wonodadi			DAU			22.682.000
7 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kecamatan Wonodadi		12.050.000	DAU			40.262.750
7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kecamatan Wonodadi			DAU			

7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Wonodadi		3.539.100	DAU		65.884.500
7	01	01	2	08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Wonodadi		106.363.632	DAU		150.494.080
7	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Wonodadi		279.291.348	DAU		101.693.404
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	Kecamatan Wonodadi	85%	16.951.400	DAU	90%	80.425.510
7	01	02	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonodadi		6.047.400	DAU		26.615.765
7	01	02	2	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonodadi		5.542.400	DAU		26.615.765

7	01	02	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Wonodadi			5.361.600	DAU			27.193.980
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Wonodadi	100%		169.270.600	DAU		100%	150.068.754
7	01	03	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Wonodadi			11.228.200	DAU			73.068.754
7	01	03	2	06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wonodadi			158.042.400	DAU			77.000.000
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Kecamatan Wonodadi	100%		11.489.800	DAU		100%	203.605.820
7	01	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonodadi			8.728.200	DAU			147.950.000

7	01	04	2	02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi		2.861.600	DAU			55.655.820
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Wonodadi	100%	52.149.000	DAU		100%	107.248.405
7	01	05	2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Wonodadi		52.249.000	DAU			107.248.405
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu - Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Kecamatan Wonodadi	94%	332.491.435	DAU		94%	116.580.530

7	01	06	2	01	Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonodadi	332.491.435	DAU	116.580.530
---	----	----	---	----	--	---	--------------------	-------------	-----	-------------

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program Kegiatan Kecamatan Wonodadi Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Blitar

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN WONODADI KAB. BLITAR TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WONODADI						2.576.846.900,49							3.167.849.992,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN						2.574.969.620,49							3.142.887.887,00	
		7.01	KECAMATAN					2.574.969.620,49							3.142.887.887,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NTA	-	-				1.992.457.374,00							2.484.958.068,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				2.588.000,00							14.841.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					19 Dokumen	2.588.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	14.841.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				1.834.277.574,00							1.947.172.827,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16 Orang/bulan	1.834.277.574,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1.842.489.677,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					19 Dokumen	30.156.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	46.315.300,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					29 Dokumen	0,00	--	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	32.210.200,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					12 Laporan	1.436.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	24.157.600,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				0,00							22.882.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Pemecanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			2					2 0	0,00	--	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	22.882.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				12.050.000,00							40.282.750,00	KECAMATAN WONODADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / DUTOCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2024	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DASRAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					16 Orang	12.050.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.262.750,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	54.337.720,00			-	-	-		142.127.507,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga					0 0	2.031.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.131.375,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0 0	35.864.720,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.976.042,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-				-	0,00	-	-	-	-	-		12.378.825,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	14.891.600,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.173.105,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Asap Diambil pada SKPD					12 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.788.160,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.539.100,00			-	-	-		65.884.500,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel					2 Unit	0,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.942.250,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 Unit	3.539.100,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.942.250,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	196.363.932,00			-	-	-		100.494.080,00	KECAMATAN WONODADI
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	15.240.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.378.075,00	KECAMATAN WONODADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	0,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	-	25.621.750,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	91.123.632,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	97.493.860,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.09	Penelitian Barang Milik Daerah Persempang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	279.291.348,00	-	-	-	-	-	-	101.683.404,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	-	-	-	5 Unit	40.025.000,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	28.183.505,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.08.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	6 Unit	8.660.000,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	20.936.830,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	230.576.348,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	52.372.849,00	KECAMATAN WONODADI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	16.951.400,00	-	-	-	-	-	-	86.425.516,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	6.047.400,00	-	-	-	-	-	-	26.615.765,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	4 Laporan	6.047.400,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	26.615.765,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	5.542.400,00	-	-	-	-	-	-	26.615.765,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.02.2.02.0002	Penilaian Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5.542.400,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.613.785,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.02.2.04	Relaksasi Urusan Permisahan yang Dilampirkan kepada Camat	-	-			-	5.361.600,00			-	-	-		27.183.880,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.02.2.04.0003	Relaksasi Urusan Permisahan yang Terkait dengan Kewenangan Lahan yang Dilampirkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lahan yang Dilampirkan				4 Laporan	5.361.600,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.183.880,00	KECAMATAN WONODADI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	169.276.400,00						-	190.968.754,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.228.200,00			-	-	-		73.958.754,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Masyarakat	5.361.600,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.495.484,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	5.666.600,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.693.270,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	158.042.400,00			-	-	-		77.000.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Peningkatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Peningkatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				55 Keluarga	2.880.800,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.493.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.493.000,00	KECAMATAN WONODADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LAKSI / AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PROJEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	LAPORAN RENCANA DAN AKHIRNYA PENYUSUNAN						KELOMPOK SASARAN	PEKERJAAN MELAKUKAKAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menwujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menwujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				55 Keluarga	2.680.000,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semus KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.400.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.06.0008	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkepasti dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkepasti dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				55 Keluarga	52.680.000,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semus KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.400.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				55 Keluarga	0,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semus KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.400.000,00	KECAMATAN WONODADI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN LUMUM														
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum														
							-	8.728.200,00			-	-	-		147.990.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.666.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.250.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11 Laporan	4.861.000,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semus KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.700.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							-	2.861.000,00			-	-	-		55.055.820,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.														
			0				0	2.861.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.855.820,00	KECAMATAN WONODADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA DPO TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E.	7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	52.148.000,00						-	107.248.405,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	-	-			-	52.148.000,00			-	-	-	-	107.248.405,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertajakan Pengarsitan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					-	0,00			-	-	-	-	14.025.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0002	Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Perilaku dan Kesatuan Bangsa	0				0,0	52.148.000,00	Kab. Bilar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.515.360,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				33 Orang	0,00	Kab. Bilar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.883.815,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0005	Perancangan Koeffik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koeffik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				8 Laporan	0,00	Kab. Bilar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.362.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kedisiplinan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0				0,0	0,00	Kab. Bilar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.262.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	0,00	Kab. Bilar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.839.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-				-	0,00			-	-	-		12.857.000,00	KECAMATAN WONODADI
E.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	332.491.405,48						-	116.588.030,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REALISASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	-	-			-	332.491.425,49			-	-	-	-	118.589.530,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0001	Facilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					10 Dokumen	7.861.600,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semesta Kalidesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.779.560,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0002	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10 Dokumen	14.871.600,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semesta Kalidesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.083.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendetaygunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendetaygunaan Aset Desa					10 Dokumen	5.361.600,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semesta Kalidesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.940.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0004	Facilitas Penetapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penetapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					10 Laporan	0,00	Kab. Situbone, Semesta Kecamatan, Semesta Kalidesa, Kab. Situbone, Wonodadi, Semesta Kalidesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.792.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0005	Facilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					11 Dokumen	0,00	Kab. Situbone, Wonodadi, Semesta Kalidesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.792.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0006	Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					11 Dokumen	385.354.235,49	Kab. Situbone, Wonodadi, Semesta Kalidesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.530.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0007	Facilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			5				11 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.794.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			5				0 0	5.180.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.470.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0009	Facilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / AKSIAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN PERBUDEGETASI / RENSTRA OPD	REALISASI / PENCAPAIAN / RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN / CAPAIAN / HAMBAT / HINDA / OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK / SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		DIBANJAKAT / DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							-	0,00	-	-	-	-	-		3.520.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0010	Facilitas Pemetaan Lokasi Pembangunan Kawasan Perkotaan														
	7.01.06.2.01.0012	Facilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan				10 Dokumen	0,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semar, Kel/Desa						3.634.200,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0013	Facilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				10 Dokumen	0,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)					4.257.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0014	Facilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
							-	0,00	-	-	-	-	-		4.015.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.3.01.0015	Facilitas Penataan, Peningkatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegakan Batas Desa														
	7.01.06.2.01.0016	Facilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				8 Dokumen	13.861.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)					17.380.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	0,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semar, Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					6.030.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	0,00	Kab. Situb, Wonodadi, Semar, Kel/Desa						7.680.000,00	KECAMATAN WONODADI
	X	NON URUSAN						1.936.200,00							24.962.965,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.936.200,00							24.962.965,00	
	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA						1.936.200,00							24.962.965,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.936.200,00							24.962.965,00	KECAMATAN WONODADI
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instansi Lurah/Pemerangai Berpunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Bitar, Wonodadi, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.902.900,00	KECAMATAN WONODADI
J U M L A H									2.576.840.909,49						3.167.840.900,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mengelola 6 Program, 16 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 merupakan program, kegiatan dan subkegiatan baru sesuai dengan PMDN nomor 90 tahun 2019. Total pagu anggaran 2026 senilai Rp. 2.576.845.809,49

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 1.992.457.374,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 2.598.000,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 1.534.277.574,-
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 12.050.000,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 54.337.720,-
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp 3.539.100,00,-
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 106.363.632,-
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 279.291.348,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 16.961.400,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan pagu anggaran Rp 6.047.400,-
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.542.400,-
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan pagu anggaran Rp 5.361.600,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu Rp 169.270.600,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp 11.228.200,-

- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp 158.042.400,-
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 11.589.800,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp 8.728.200,-
 - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pagu anggaran Rp 2.861.600,-
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu Rp 52.149.000,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah dengan pagu Rp. 52.149.000,-
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 332.491.435,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 332.491.435,-

BAB V

PENUTUP

Catatan penting

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Wonodadi dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Wonodadi tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ada faktor pendukung untuk mencapai pelaksanaan tersebut diantaranya :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
2. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Wonodadi,
3. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya kegiatan masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Perencanaan yang sudah di tetapkan masih bisa berubah ketergantungan dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik.

Kaidah kaidah pelaksanaan

a. Akuntabilitas :

Program, kegiatan dan sub kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan, maupun manfaat. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.

b. **Transparansi**

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.

c. **Efisiensi dan efektivitas**

Penggunaan sumber daya baik anggaran, sumber daya manusia (SDM), maupun waktu harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal.

d. **Partisipasi**

Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan, harus senantiasa membuka ruang dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

e. **Sinergi dan koordinasi**

Pelaksanaan kegiatan harus senantiasa mengedepankan sinergi dan koordinasi, baik secara internal antar seksi maupun secara eksternal dengan OPD terkait, Pemerintah Desa, dan unsur Forkopimcam

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Wonodadi, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Wonodadi untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;

Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Wonodadi, 25 Agustus 2025

CAMAT WONODADI

IMAM SAFIL, SH., MH
Pembina Tk I
NIP. 19700404 199703 1 008

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN WONODADI KAB. BLITAR
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / DUTODIBE / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WONODADI						2.576.846.980,49							3.167.848.982,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.574.969.620,49							3.142.887.887,00	
	7.01	KECAMATAN						2.574.969.620,49							3.142.887.887,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.992.457.374,00						-	2.484.958.068,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.588.000,00			-	-	-	-	14.841.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	2.588.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	14.841.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.834.277.574,00			-	-	-	-	1.947.172.827,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.834.277.574,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.842.489.677,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				19 Dokumen	30.156.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	46.315.300,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				29 Dokumen	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	32.210.200,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.436.000,00	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	24.157.650,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	22.882.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Pelaksanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			0				20	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	22.882.000,00	KECAMATAN WONODADI
	7.01.01.2.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.050.000,00			-	-	-	-	40.262.750,00	KECAMATAN WONODADI